

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2014). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Afifah, S. A. (2016). Pengaruh Pemahaman Regulasi Dan Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Boyolali). *Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Amalia, N. F. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 2252-6765. Diambil Kembali Dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Amalia, N. F. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Purworejo). *Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.
- Andriani, T. D., & Sudarsana. (2018). Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2016 Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Grobogan. *Journal Of Development And Social Change, Vol. 1*, 65-75. Diambil Kembali Dari <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>
- Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan. Diambil Kembali Dari <http://ovy19.wordpress.com>
- Arifin, Z. (2018). Pengaruh Political Background Dan Pengetahuan Dewan. (*Studi Pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo*). *Skripsi: Fakultas Ekonomi Ponorogo*.
- Baker, & Sinkula. (2005). Product Innovation Management. *Usa: Journal Of Market-Focused Management*.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke Delapan Belas Edisi Iv. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*
- Dewi, I. M. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Undip*.
- Friantama, P., & Mukhzarudfa. (2017). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan

- Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada DPRD Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi. Universitas Jambi* 2017.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss 23* (Edisi 8 Ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryani, R. (2011). Pengaruh Political Bckground Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan (APBD) Dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi Kasus Di DPRD Provinsi Sumatera Utara). *Tesis S2: Sekolah Paca Sarjana Universitas Sumatera, Medan*.
- Kartikasari, D. (2012). Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Boyolali). *Accounting Analysis Journal. Semarang: Universitas Negeri Semarang*. Diambil Kembali Dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Kasus Korupsi Dana Hibah Dan Bantuan Sosial (Bansos) Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017.
- Kuswandi, A. (2016). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam 45 (Unisma).
- Lembaga Administrasi Negara. 2010. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jakarta : LAN.*
- Mandacan, M. W., Sabijono, H., & Runtu, T. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Terhadap Pengawasan Keuangan (APBD) Daerah Di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(3)*, 98-107.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik. Penerbit: Andy Yogyakarta*.
- Mayasari, R. (2012). Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Apbd Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi*, 48-64.
- Munthe, P. N. (2019). Pengaruh Personal Background, Dan Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Inspektorat Pemerintah Kabupaten LabuhanBatu). *Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*.
- Noviatiani, & Nurmalita, L. (2014). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Di Kota DPRD Kota Bandung. *Jurnal*.

- Nugroho, S. (2014). *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Grobogan)*. *Naskah Publikasi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Oktasari, R. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Di DPRD Kabupaten Karanganyar*. *Naskah Publikasi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Palupi, N. A. (2012). *Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Moderasi*. *Accounting Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang*.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Putra, D. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah*. *Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Padang*.
- Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Sakti, O. Y. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Trenggalek*. *Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Sari, D. U. (2016). *Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. *Artikel Skripsi: Universitas Negeri Padang*. Diambil Kembali Dari <http://www.ejournal.unp.ac.id>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Walgito, B. (2013). *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widyaningsih, A., & Pujirahayu, I. (2012). Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating. (*Penelitian Pada DPRD Kabupaten Sukabumi*), Vol. 2, 2088-2106.
- Winarna, J., & Murni, S. (2007). Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). *Universitas Sebelas Maret. Jurnal. Sna X*.
- Winarna, Jaka, & Murni. (2006). Pengaruh Personal Background, Political Background, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Ke X. Juli. Makasar*.
- Wowor, R. D., Manossoh, H., & Wokas, H. (2018). Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan, Pengalaman Organisasi, Pemahaman Tentang Anggaran Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Anggota DPRD Kota Manado, Kota Bitung Dan Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13 (3)*, 571-580.
- Yudhoyono, B. (2000). Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Diambil Kembali Dari <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm>.